

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barbara, K. (2008). *Fundamental of Nursing, Seventh Edition, Vol. 2*. Jakarta: EGC.
- Hadari, N. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, N. (2005). *Otonomi Daerah Filosofi, Sejauh Mana Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Istianto, B. (2009). *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muluk, K. (2005). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Riawan. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjiyono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, S. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Ashardhita, P., & Astuti, P. (2017). Penegakan Hukum Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Oleh Polrestabes Surabaya. *Jurnal Novum*, 2(2).
- Cawidu, R. A. (2016). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mengatasi Situs Porno Pada Media Maya Studi Peran Departemen Komunikasi dan Informatika RI Dalam Penyusunan Kebijakan Komunikasi Indonesian Government Policy in Overcoming Porn Sites in Cyber Media. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 236-248.
- Christianto, H. (2017). Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet. *Veritas et Justitia*, 3(1), 117-137.
- Faozan, A. (2014). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *La Riba*, 7(1), 1-14.

- Laksana, A. W., & Suratman, S. (2014). Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 169-177.
- Lutfa, U., & Maliya, A. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Pasien Dalam Tindakan Kemoterapi di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. *Berita Ilmu Keperawatan*, 1(4), 187-192.
- Manurung, H. A., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-13.
- Santoso, S. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi. *Jurnal Refleksi Hukum*, 8(1).
- Sari, A. L. (2013). Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Lingga). *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1).

Skripsi

- Abdi, H. (2014). *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Pekanbaru: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bangsawan, I. P. (2013). *Analisis Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen (Studi Pada Wilayah Hukum Kota Metro)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Noris, H. F. (2015). *Upaya Preventif Orang Tua Dari Tindak Pedofilia Pada Anak (Studi Pada Orang Tua Bekerja Sebagai Petani Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Lampung Timur)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Septianti, A. L. (2014). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Dalam Media Internet Oleh Pihak Kepolisian di Kota Makasar (Studi Kasus Polrestabes Makasar)*. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Thesis

- Gunawan, A. (2017). Pengaruh Kegiatan Matrikulasi Pendidikan Seks dan Kesadaran tentang Bahaya Pornografi terhadap Karakter Siswa MI Darwata Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. *Online Thesis*, 11(1).
- Kaswara, S. A. (2014). *Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Subaidi, S. (2016). *Tindakan Preventif Interaksi Negatif Siswa Melalui Segregasi Kelas Berbasis Gender di Sekolah Menengah Pertama Al-Falah Ketintang Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Disertasi

Arumawan, D. P., & Iksan, S. H. (2016). *Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Website

Edy, C. W. (2017, November 20). *Prostitusi Online Tawarkan Mahasiswi di Jogja Terungkap*. Retrieved from Tribun Jateng: <http://jateng.tribunnews.com/2017/11/20/prostitusi-online-tawarkan-mahasiswi-di-jogja-terungkap>

Murprapto, A. (2017, Juli 5). *Polresta Berhasil Ungkap Kasus Prostitusi Online di Yogyakarta*. Retrieved from Polda DIY: (<http://jogja.polri.go.id/website/2017/10/02/ungkap-prostitusi-online-di-yogyakarta-polisi-amankan-mucikari/>).

Tri, T. (2017, Oktober 2). *Satreskrim Polresta Yogyakarta Berhasil Mengungkap Tindak Pidana Pornografi*. Retrieved from Polda DIY: (<http://jogja.polri.go.id/website/2017/10/02/satreskrim-polresta-yogyakarta-berhasil-mengungkap-kasu-tindak-pidana-pornografi/>).

Ulum, M. (2017, Juli 20). *20 Situs dan Akun Penebar Kebencian Dibangun di DIY*. Retrieved from Jawa Tengah: <http://semarang.bisnis.com/read/20170720/8/95395/20-situs-dan-akun-penebar-kebencian-dibangun-di-diy>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Layanan Internet yang Tersaring Walikota Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi